

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pengangguran terbuka masih menjadi permasalahan yang menonjol dalam proses pembangunan ekonomi, termasuk di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun wilayah ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar, penyerapan tenaga kerja belum berjalan secara optimal akibat dominasi sektor ekstraktif yang bersifat padat modal. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis determinan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2017 – 2025. Adapun berikut ini kesimpulan dari hasil analisis tersebut:

1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan jumlah angkatan kerja yang aktif memasuki pasar kerja tidak diimbangi oleh ekspansi permintaan agregat dan penciptaan lapangan kerja yang memadai, sehingga kelebihan penawaran tenaga kerja mendorong naiknya angka pengangguran terbuka.
2. Upah minimum memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan upah minimum yang memperkuat daya beli masyarakat, mendorong permintaan agregat, serta merangsang ekspansi sektor jasa dan perdagangan, sehingga pada gilirannya mampu memperluas penyerapan tenaga kerja dan menekan angka pengangguran terbuka.

3. Rata-rata lama sekolah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan yang dimiliki angkatan kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh sektor industri dominan di Kalimantan Timur, sehingga investasi pendidikan belum mampu dikonversi secara optimal menjadi kesempatan kerja dan justru mendorong kenaikan angka pengangguran terbuka.
4. Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini disebabkan oleh ekspansi aktivitas produksi yang menyertai pertumbuhan ekonomi sehingga mendorong peningkatan permintaan tenaga kerja di berbagai sektor, yang pada gilirannya mampu menyerap angkatan kerja secara lebih luas dan menekan angka pengangguran terbuka.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, diperlukan upaya konkret dari pemerintah daerah, pelaku ekonomi, dan pemangku kepentingan lainnya untuk merespons hasil temuan ini dengan kebijakan yang tepat sasaran. Beberapa saran berikut diharapkan dapat menjadi masukan dalam upaya menekan tingkat pengangguran terbuka di kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Pentingnya mendorong pemerataan akses pelatihan kerja yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja daerah, terutama di wilayah yang selama ini masih kekurangan fasilitas pelatihan. Tingginya rata-rata lama sekolah di Kalimantan Timur yang justru berbanding lurus dengan meningkatnya

pengangguran terbuka mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara kemampuan lulusan dan kebutuhan industri. Dinas Ketenagakerjaan bersama Balai Latihan Kerja perlu merancang program pelatihan yang mencerminkan kebutuhan riil pasar kerja, termasuk keterampilan yang berkaitan dengan perkembangan dunia kerja saat ini, dengan melibatkan asosiasi pengusaha secara aktif dalam penyusunan standar kompetensi yang diajarkan, sehingga setiap peningkatan pendidikan masyarakat dapat benar-benar dikonversi menjadi kesempatan kerja yang nyata dan merata di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pentingnya mendorong pertumbuhan sektor usaha yang mampu menyerap angkatan kerja secara lebih luas di luar sektor ekstraktif yang selama ini mendominasi perekonomian Kalimantan Timur. Seiring semakin meluasnya penggunaan mesin dan otomasi di sektor industri besar, lapangan kerja bagi angkatan kerja umum justru semakin banyak tersedia di sektor jasa, perdagangan daring, logistik, dan usaha mandiri berbasis ekonomi digital. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha dan perguruan tinggi perlu bersinergi dalam mendorong pertumbuhan sektor-sektor tersebut melalui kemudahan akses permodalan dan pendampingan usaha, serta mendorong peran strategis UMKM dalam penciptaan lapangan kerja agar pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan manfaatnya secara langsung oleh seluruh angkatan kerja di Kalimantan Timur.
3. Kebijakan upah minimum perlu ditetapkan secara proporsional dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi riil masing-masing kabupaten/kota, kemampuan pelaku usaha, serta kebutuhan hidup layak pekerja. Di tengah semakin meluasnya otomasi di berbagai sektor industri, penetapan upah yang

tepat menjadi semakin penting agar kebijakan tersebut tidak mendorong perusahaan untuk semakin mempercepat penggantian tenaga kerja manusia dengan mesin. Pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan perlu memperkuat pengawasan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan upah minimum, sekaligus mendorong lebih banyak pekerja di sektor informal untuk dapat masuk ke dalam lapangan kerja resmi yang memberikan perlindungan dan kepastian pendapatan. Pelaku usaha dan asosiasi pengusaha perlu turut berkomitmen dalam menciptakan lingkungan kerja yang layak sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pasar tenaga kerja daerah.

4. Pemerintah daerah perlu mendorong strategi pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan nilai PDRB semata, tetapi juga menjamin bahwa hasil pertumbuhan ekonomi tersebut dapat menciptakan lapangan kerja secara nyata dan merata di seluruh kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur. Penguatan konektivitas antarwilayah, pemerataan investasi, serta peningkatan akses kelompok masyarakat berpendapatan rendah terhadap sumber daya dan peluang ekonomi yang tersedia perlu menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan perguruan tinggi, agar setiap peningkatan aktivitas ekonomi daerah dapat berkontribusi langsung terhadap penurunan angka pengangguran terbuka di Provinsi Kalimantan Timur.